



# RANCANGAN AKHIR

## RENCANA STRATEGIS

### DINAS KETAHANAN PANGAN

2025 - 2029



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dokumen Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan selama 5 (lima) tahun periode 2025-2030.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2025-2029, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian visi dan misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,      Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. YAN ERY, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700930 199703 1 003

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	28
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	34
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 .....	37
3.2 Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.....	38
3.3 Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.....	39
3.4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.....	41
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	43
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	48

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara moderen hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam sebuah organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Sesuai dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan bahan koordinasi untuk ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan

dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun kedepan.

Perlu disadari bahwa kinerja serta efektifitas dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan pertanian merupakan hasil kerja kolektif dari upaya dan kinerja berbagai unit kerja instansi terkait serta petani/masyarakat dan pelaku dunia usaha lainnya secara sinergis. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, hingga pelaksanaan dilapangan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian output program.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
  14. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional ;
  15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang susunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 - 2043. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32) ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024–2044;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang pangan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan untuk 5 Tahun serta Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan pangan tahun 2025 – 2029.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

BAB I paling sedikit memuat :

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

#### **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat :

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah
- b. Isu Strategis

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Bab 3 paling sedikit memuat

- a. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029
- b. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029
- c. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- d. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan**

#### **Bidang Urusan**

Bab IV paling sedikit memuat

- a. Uraian Program
- b. Uraian Kegiatan
- c. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif
- d. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### ***2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan***

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan SKPD yang menangani urusan pilihan bidang pertanian. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pangan.

#### ***1. KEPALA DINAS***

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pangan. Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 361, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan ;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. *BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN***

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. *BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN***

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. *BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN***

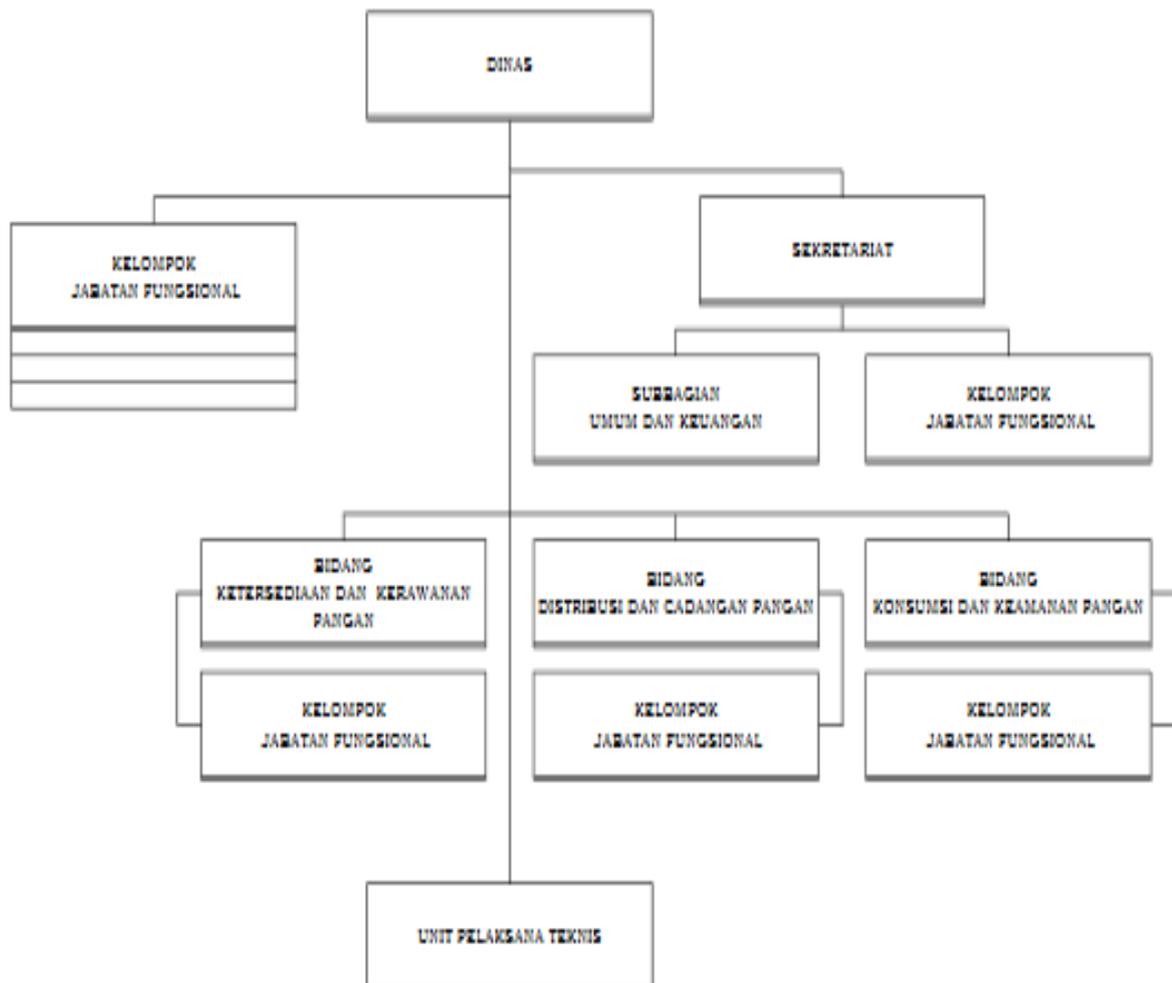
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;

- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
(BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2023)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 orang, yang terdiri dari:

1. 1 (Satu) orang kepala Dinas.
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 1 (satu) orang Kasubbag umum dan keuangan
4. 1 (satu) orang Analis Perencanaan
5. 3 (tiga) orang kepala Bidang
6. 3 (tiga) orang Analis Ketahanan Pangan
7. 5 (lima) orang sebagai staf atau Fungsional Umum
8. 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dibantu oleh 17 orang tenaga Honorer/Kontrak (TKK). Susunan Kepegawaian Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 3 Orang

b. Golongan III, sebanyak 10 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 7 Orang
- Golongan III/c : 1 Orang
- Golongan III/b : - Orang
- Golongan III/a : 2 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 2 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 10 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 1 Orang

Menurut Eselon, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
- b. Eselon III, sebanyak 4 Orang
- c. Non Eselon, sebanyak 10 Orang

## 2.2.2. Aset Peralatan Dinas

Tabel 2.1 Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Aset Dinas	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Meja Kerja	43	Unit
3	Kursi Kerja	18	Unit
4	Meja Rapat	1	Set
5	Kursi Rapat	42	Unit
6	Komputer	11	Unit
7	Printer	25	Unit
8	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	2	Unit
9	Kendaraan Roda Dua (Motor)	13	Unit
10	Laptop	14	Unit
11	Sound System	2	Unit
12	Mesin genset	1	Unit
13	Filling kabinet	9	Unit
14	Lemari Arsip	10	Unit
15	Running Text	1	Unit
16	AC	7	Unit
17	Infokus	1	Unit
18	Mesin Feximile	1	Unit
19	Brangkas	1	Unit
20	Mesin Photochopy Canon	1	Unit
21	PDAM	1	Jaringan
22	Instalasi Listrik	1	Jaringan
23	Stabilisator	2	Unit
24	Mesin Absensi	1	Unit
25	CCTV	1	Set
26	Proyektor	1	Set

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2021 – 2026 dimana Dinas Ketahanan Pangan merupakan organisasi pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

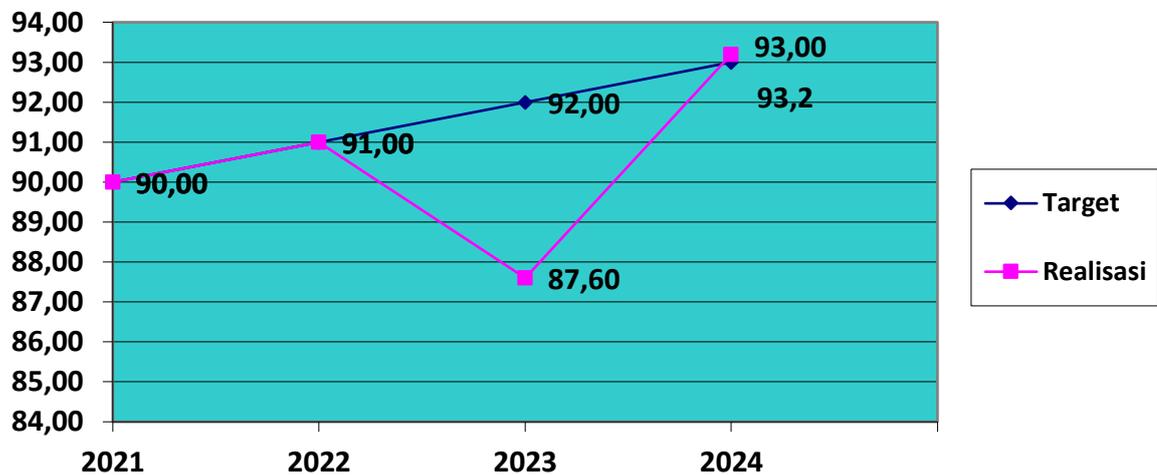
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ada tiga Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dengan indikator Skor PPH Ketersediaan (2) Meningkatnya keberagaman konsumsi masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan (3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, yang ditunjukkan dengan indikator Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten.

#### a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun dari 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 90,00 menjadi 90 namun masih dibawah angka ideal yaitu 100. Hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam dimana masih tingginya konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak. Selain itu konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayur, buah, dan kacang-kacangan masih rendah. Di

bawah ini dapat dilihat capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :



Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan Cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

#### **b. Penguatan Cadangan Pangan**

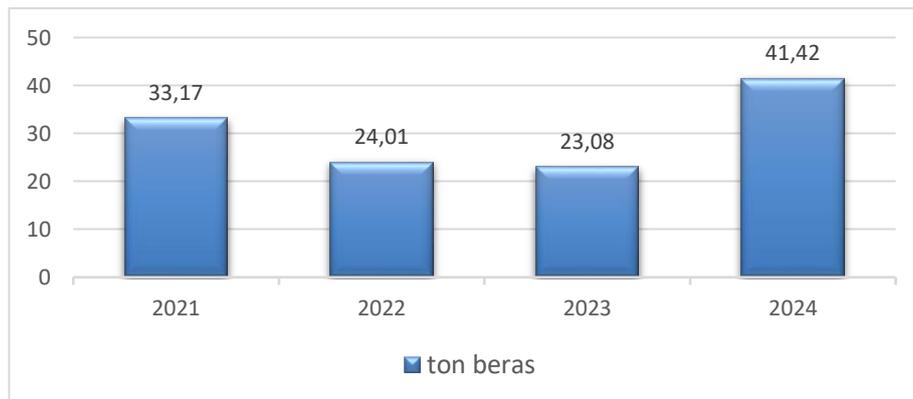
Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan.

Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas Cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- a. Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;
- b. masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan
- c. Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya Cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat,Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikelola oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) pada tahun 2021 – 2024 sebagai berikut



### c. Penyediaan Informasi Harga Pangan

Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c) ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintah; dan (h) daya beli masyarakat.

Fluktuasi harga pangan akan berpengaruh kepada kesejahteraan produsen maupun konsumen. Ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkan kesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen.

Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (*time series*) dari sasaran yang sama. Metode panel data ini terbukti mampu

menggambarkan dinamika perkembangan data dalam kurun waktu relatif panjang. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Berikut ini dapat dilihat tabel perkembangan harga rata-rata bahan pangan pokok di Tingkat Eceran dari tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perkembangan Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok di Tingkat Eceran dari Tahun 2021– 2024 di Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	KOMODITI	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	12.000	12.000	13.000	14.500	15.772
2	Jagung Pipilan	8.000	8.500	9.000	10.000	10.000
3	Kedelai	10.000	8.500	12.000	14.500	14.200
4	Daging Sapi	140.000	140.000	140.000	140.000	143.005
5	Daging Ayam	33.000	35.000	35.000	30.500	36.856
6	Telur Ayam Ras	1.800	1.700	1.800	1.800	1.925
7	Minyak Goreng	13.500	15.000	15.000	15.500	15.520
8	Gula Pasir	14.000	13.500	14.000	15.200	17.722
9	Cabe Merah Keriting	34.000	37.000	45.000	39.800	43.654

Sumber : Dinas Ketahan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat 2025

#### d. Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Salah satu upaya untuk memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan dan kerentanan pangan suatu daerah, maka dilaksanakan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi dan ketahanan pangan. Melalui pengembangan peta tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pemetaan yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh wilayah Indonesia. Penyusunan peta digunakan untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi prevelansi kerawanan pangan dan gizi. Sejak tahun 2002, pemerintah bekerja dengan World Food Programing (WFP) untuk memperkuat pemahaman ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan. Peta ini berfungsi sebagai alat untuk

meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan dibidang ketahanan pangan . Kerja sama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (Food Security Atlas – FIA) pada tahun 2005 dengan cakupan wilayah analisis sampai dengan tingkat kabupaten. Peta tersebut kemudian dimutakhirkan dan diubah menjadi peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability and Atlas –FSVA) pada tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional pada tahun 2010 mulai disusun FSVA Provinsi dengan unit analisa sampai dengan tingkat kecamatan. Peta tersebut terakhir dimutakhirkan pada tahun 2014. Untuk mempertajam tingkat analisis ketahanan pangan dan kerentanan pangan pada tahun 2012 mulai disusun FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampai dengan level desa. Peta ini mengklasifikasikan desa pada kabupaten berdasarkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kehidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) tingkat desa adalah menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di kabupaten sehingga FSVA dapat menjawab:

1. ***Dimana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan?*** (Lokasi Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat dari Peta Komposit).
2. ***Mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan?*** (Lokasi Desa se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat dari Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Sarana dan Prasarana

Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga, Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk Desa, Desa yang tidak memiliki Akses Penghubung Memadai, Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih, Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Kepadatan Penduduk.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), jumlah desa rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah desa tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin membaik. Dari hasil analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2024 dapat disimpulkan:

1. Aspek ketersediaan pangan :

sebanyak 9 Desa / Kelurahan (9%) tidak tersedia / memadai lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan bagi masyarakat Desa / Kelurahan setempat, dan sebanyak 31 Desa (23%) Desa / Kelurahan di Tanjab Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap rumah tangga masih belum memadai.

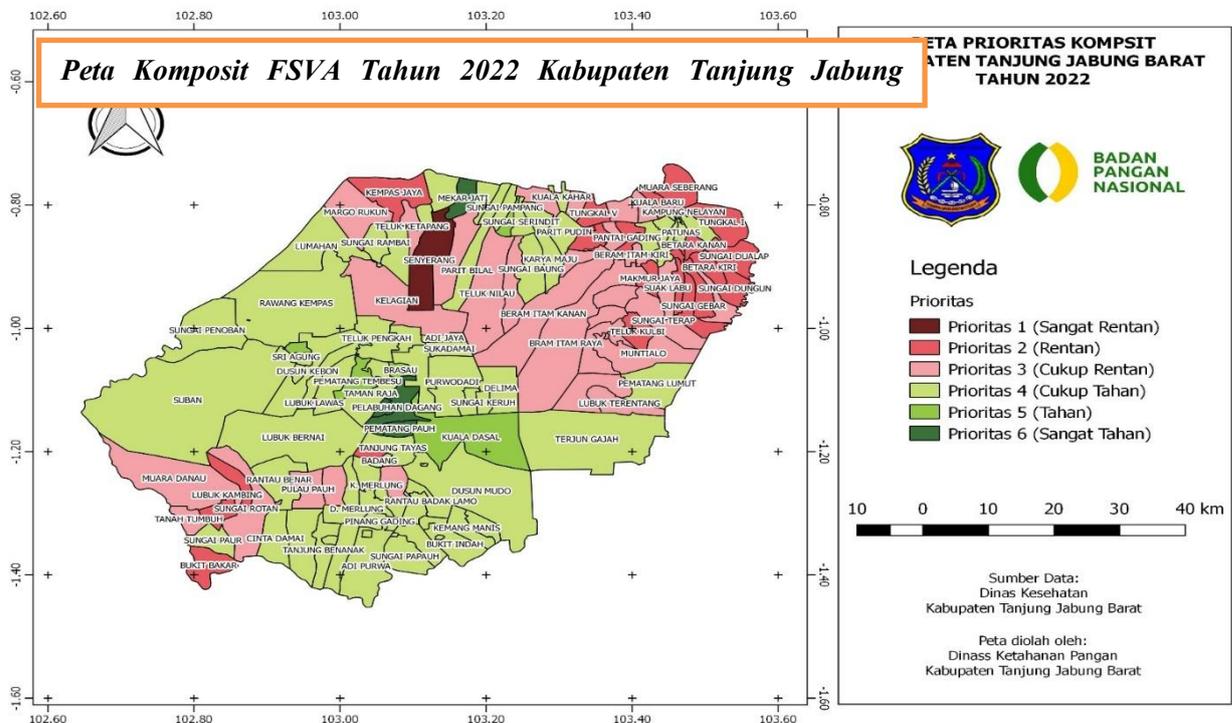
2. Aspek keterjangkauan / Akses Pangan :

Terdapat 4 (3%) Desa / Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 9% dari jumlah penduduk desa, dan Seluruh Desa / Kelurahan memiliki akses penghubung melalui darat, air maupun udara sehingga tidak ada Desa/Kelurahan yang memerlukan penanganan prioritas 1, 2 maupun 3.

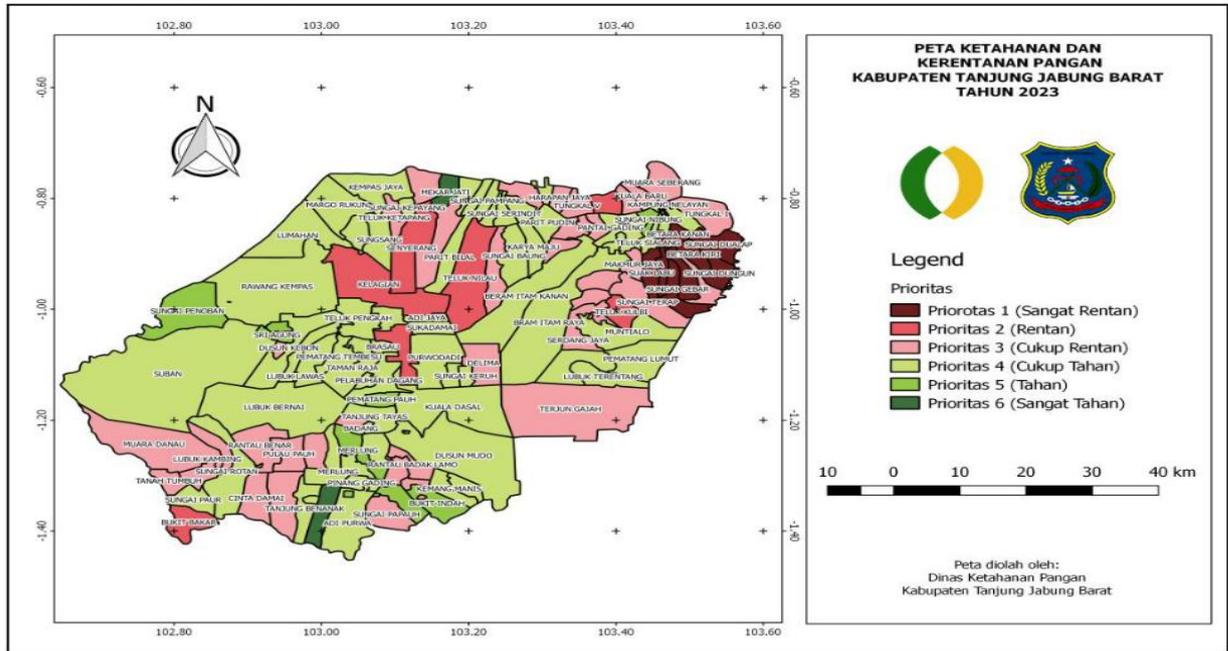
3. Aspek Pemanfaatan Pangan :

Terdapat 100% Desa / Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah mendapatkan air bersih, dan 59% Desa/Keluarhaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah tenaga kesehatan masih rendah terhadap jumlah penduduk sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pemanfaatan pangan pada wilayah tersebut.

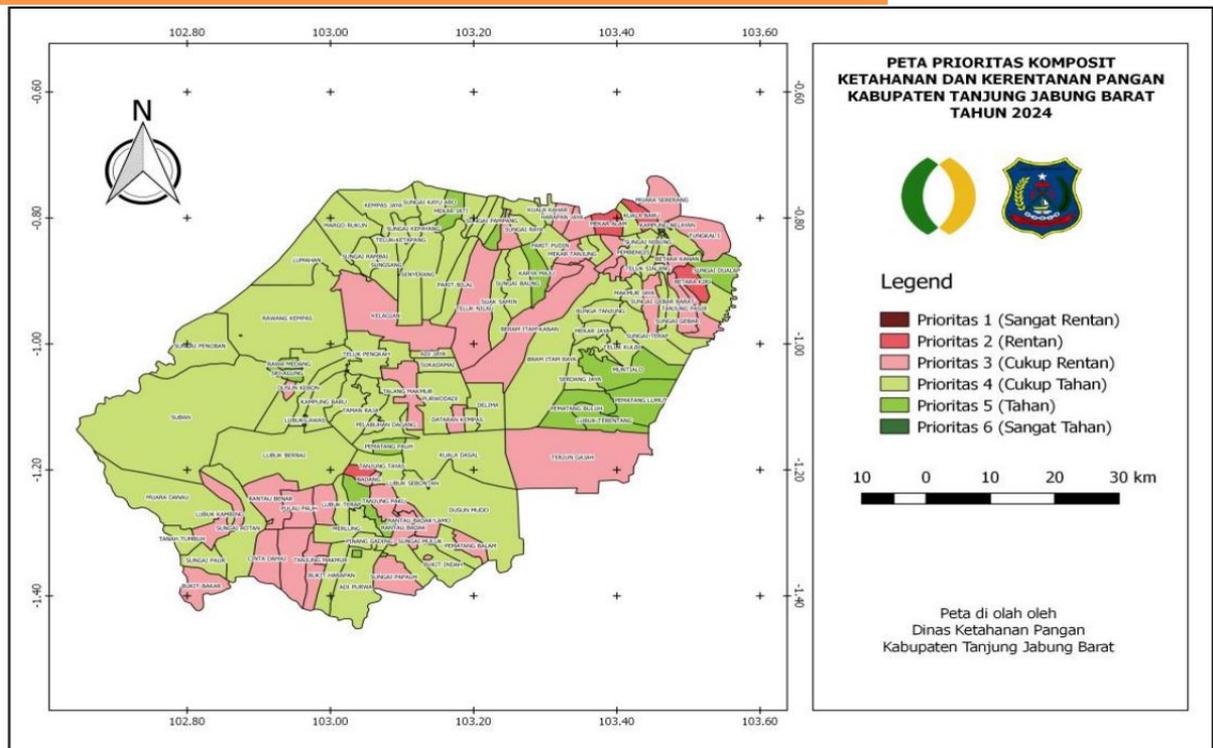
Sesuai dengan hasil analisa dan pengolahan data tahun 2024 untuk rasio Komposit, dari 134 desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat terdapat Desa atau (0%) dari Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah sangat rentan pangan sehingga tidak memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 1, 6 Desa atau (4%) dari Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah rentan pangan sehingga memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 2, 39 Desa atau (29%) dari Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori cukup rentan pangan sehingga memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 3, 75 Desa atau (56%) Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori cukup tahan pangan sehingga memerlukan Prioritas Penanganan Tingkat 4, 13 Desa atau (10%) Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk tahan pangan sehingga memerlukan Penanganan Tingkat 5 dan 1 Desa atau (1%) Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk sangat tahan pangan sehingga memerlukan Penanganan Tingkat 6.



**Peta Komposit FSVA Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung**



**Peta Komposit FSVA Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung**



#### e. Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun) NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah total yang diimpor dan dikurangi dengan jumlah total yang diekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari produksi daerah (lokal), pasokan dari luar Kabupaten serta stock/cadangan pangan. Ketersediaan bahan pangan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal jumlah maupun mutu pangan untuk dikonsumsi seluruh penduduk di setiap wilayah dan waktu.

Besarnya jumlah bahan pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi diperoleh dengan pendekatan jumlah penduduk dikalikan dengan angka konsumsi (Susenas tahun 2015) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Kebutuhan pangan untuk konsumsi ditentukan oleh pola konsumsi masyarakat dan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan angka proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 berjumlah 331.058 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disamping ditentukan dari angka kelahiran dan kematian juga disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk

(migrasi). Disisi lain dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi terhadap ketersediaan pangan dan gizi di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM). Ketersediaan bahan pangan utama pada tahun 2024 telah mampu mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditingkat konsumsi (2.150 kkal/kapita/hari), dan melebihi angka ketersediaan energi dan protein yang direkomendasikan yaitu 2.400 kkal dan 63 gram. Kelompok padi-padian yaitu beras dan jagung merupakan kelompok tertinggi penyumbang energi selain kelompok minyak dan lemak.

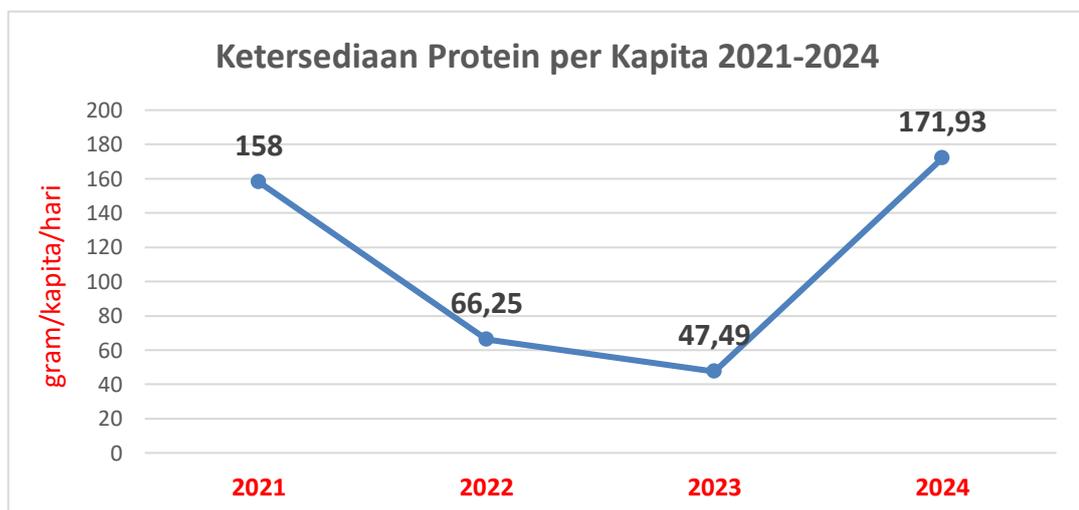
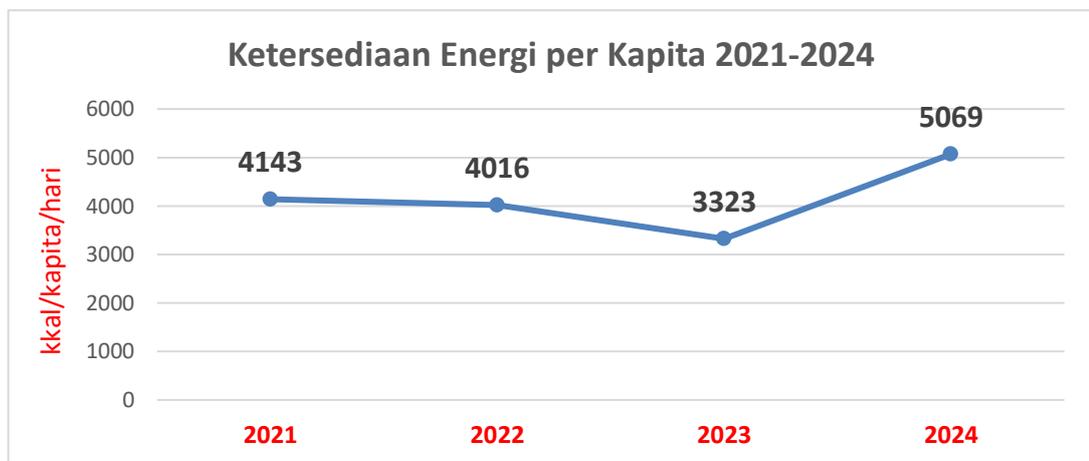
Dari sebelas komoditi pangan utama tersebut dibawah ini yang dihasilkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat empat komoditi yang sudah mampu mencukupi kebutuhan penduduk yaitu beras, jagung, daging unggas, serta ikan.

Tabel 2.3 Ketersediaan Bahan Utama Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 s/d 2024

No	Uraian	Ketersediaan per Tahun (ton)			
		2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b><i>Pangan Nabati</i></b>				
	1. Beras	23.588	29.571	28.517	26.649,177
	2. Jagung	742	6.803	2.817	1.801,360
	3. Kedelai	1.879	-	68	1.416,611
	4. Kacang Tanah	10	10	10	117,636
	5. Ubi Kayu	3.125	3.125	3.541	3.017,029
	6. Ubi Jalar	274	274	174	128,480
	7. Sayuran	5.650	5.650	6.661	5.912,067
	8. Buah-Buahan	42.860	42.860	43.865	5.735,612
<b>II</b>	<b><i>Pangan Hewani</i></b>				
	1. Daging Sapi/Kerbau	336.156	336.156	310	240.758
	2. Daging Ayam	2.205,7	2.205,7	3.112	3.832,626
	3. Telur	971,776	971,776	878	1.039,130
	4. Susu	-	-	-	752.439
	5. Ikan	17.128	17.128	16.107	21.619,369

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat gambaran umum ketersediaan pangan dan gizi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2020 adalah sebagai berikut yaitu ketersediaan energi kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3.588 kkal/kap/hari, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memenuhi angka kecukupan energi yang dianjurkan pada tingkat ketersediaan yaitu sebesar 2.400 Kkalori/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012).



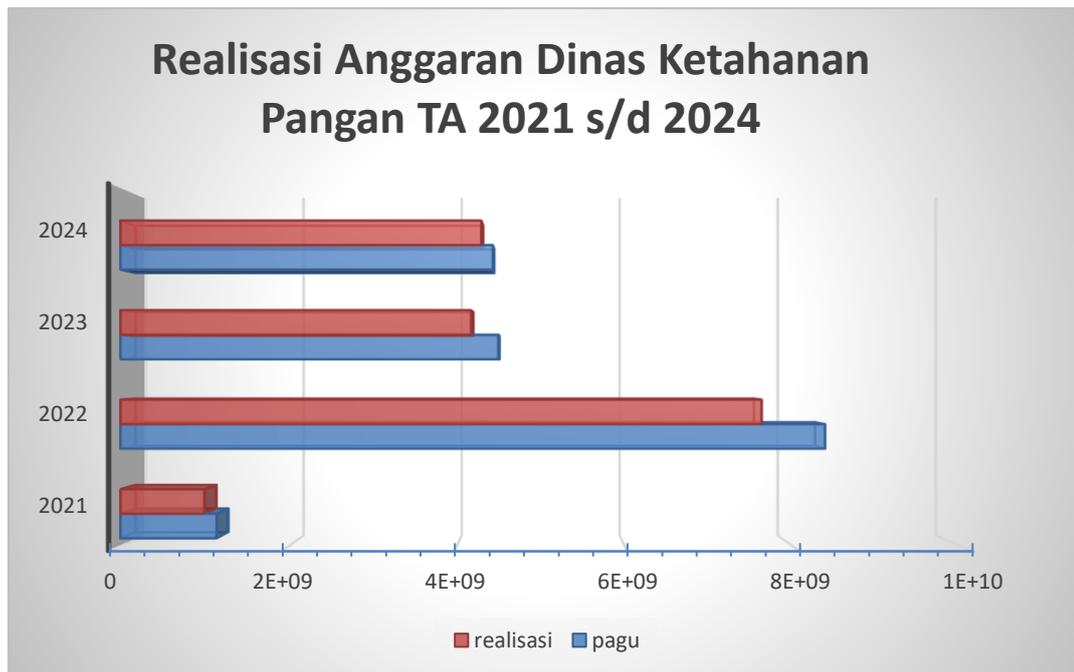
Berdasarkan hasil analisa dari data produksi bahan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang selanjutnya disusun dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2024, Ketersediaan energi di Tanjung Jabung Barat lebih banyak bersumber dari pangan nabati yaitu sebesar 3.073

Kkal/kapita/hari atau 60,62 %, sedangkan yang bersumber dari pangan hewani hanya memberikan sumbangan sebesar 1.997 Kkal/kapita/hari atau 39,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari kelompok pangan hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mampu untuk memenuhi ketersediaan energi ideal.

Ketersediaan protein Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan Tahun 2024 sebesar 171,93 gram/kapita/hari, tingkat ketersediaan protein telah melampaui angka kecukupan protein yang disarankan secara nasional yakni sebesar 63 gram/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012). Ketersediaan protein Tanjung Jabung Barat sebagian besar bersumber dari pangan nabati yaitu sebesar 37,19 gram/kapita/hari atau 21,63%, sedangkan yang bersumber dari pangan hewani sebesar 134,75 gram/kapita/hari atau 78,37 persen. Tingginya ketersediaan protein yang bersumber dari pangan hewani bersumber dari turunnya tingkat produksi susu hal itu menyebabkan ketersediaan protein untuk dikonsumsi secara ideal sudah berimbang.

Untuk ketersediaan lemak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan tahun 2024 adalah sebesar 353,40 gram/kapita/hari, terdiri dari sebagian besar lemak yang bersumber dari pangan nabati sebesar 195,96 atau 55,45% , sedangkan yang bersumber dari pangan hewani hanya 157,43 gram/kapita/hari atau 44,55%.

Secara grafis, realisasi anggaran tahun 2021 s/d 2024 posisi bulan Desember dibandingkan dengan Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari data yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa baik dari sisi pagu anggaran dengan realisasi anggaran tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 secara umum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan rasio realisasi anggaran diatas 95 % Per tahunnya dan cukup mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Ketahanan Pangan umumnya mencakup masyarakat miskin, perempuan buta huruf, masyarakat gizi, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan dukungan ketahanan pangan. Kelompok sasaran ini menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Dinas Ketahanan Pangan.

Lebih detailnya, kelompok sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Masyarakat Rentan

Kelompok yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar, seperti keluarga miskin, anak-anak, lansia, dan kelompok dengan masalah gizi.

b. Petani

Mereka yang terlibat dalam produksi pangan dan membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, teknologi, dan infrastruktur pertanian.

c. Pelaku Usaha Pangan

Kelompok yang berperan dalam distribusi, penyimpanan, dan pemasaran pangan, dan membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, standar keamanan pangan, dan kemudahan akses pasar.

d. Penyuluh Pangan

Mereka yang berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan terkait ketahanan pangan dan gizi kepada masyarakat.

e. Komunitas Lokal

Masyarakat di tingkat desa atau kecamatan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

f. Stakeholders Lainnya

Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi lain yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan.

Dengan mengidentifikasi dan menyasar kelompok sasaran dengan tepat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barata dapat mengoptimalkan program-programnya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mendukung Perencanaan Strategis 2025 – 2029 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung maka harus ada keselarasan dengan Pemerintah Pusat yang ditugaskan mengurus Pangan yaitu melalui Badan Pangan Nasional. Dari hasil analisis terhadap Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029 untuk Lingkup Pangan, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia ditujukan untuk mendukung Agenda Pembangunan (AP) 05 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan mendukung Landasan Transformasi Indonesia Emas (IE) 16 yaitu Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut

No	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tanjabbar
1	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi (PPH Konsumsi dan Persentase Wilayah Rentan Rawan Pangan)	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pekarangan Pangan Lestari
		Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pengujian Kualitas Pangan Segar Asal Tumbuhan
		Penguatan Pangan Lokal	
		Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Penguatan Sistem Keamanan Pangan dan Gizi
2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional (PPH Ketersediaan)	Penguatan Cadangan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Daerah Distribusi Cadangan Pangan Penguatan Lumbung Pangan
3	Penguatan tata Kelola Sistem Pangan (Ketersediaan Data Pendukung Sistem Pangan)	Penguatan Satu Data Pangan	Satu data pangan di kabupaten
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Fasilitasi Distribusi Pangan (Gerakan Pangan Murah)

Berdasarkan reuiu Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Badan Pangan Nasional Republik Indonesia ini akan berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029. Perlunya dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan

ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan kedepan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud dimasa mendatang.

Dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus mempertimbangkan faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu sangat penting kiranya untuk melihat adanya peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dari suatu program atau kegiatan itu sendiri. Persiapan atau perencanaan dapat diawali dengan dengan memilih dan menetapkan strategi dan sasaran yang diinginkan, hal ini dapat dilakukan dengan suatu analisis yang disebut analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).

Berikut merupakan analisa SWOT strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengembangan ketahanan pangan daerah yaitu :

### **1. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

#### *a. Kekuatan (Strengths)*

- 1) Dukungan kebijakan pemerintah daerah
- 2) Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam bidang ketahanan pangan
- 3) Infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan pangan, lahan pertanian, dan alat pertanian.
- 4) Data dan informasi yang lengkap mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan di wilayah kerja.
- 5) Program-program yang telah berjalan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.

#### *b. Kelemahan (Weaknesses)*

- 1) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan operasional dan pengembangan program.
- 2) Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah.
- 3) Keterbatasan akses informasi dan teknologi bagi petani dan masyarakat.

- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program ketahanan pangan.
- 5) Masalah distribusi pangan yang belum optimal.masyarakat

## **2. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

### *c. Peluang (Opportunities)*

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.
- 2) Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat khususnya Badan Pangan Nasional.
- 3) Perkembangan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas.
- 4) Potensi pengembangan agrowisata dan pemasaran produk pangan lokal.
- 5) Kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan ketahanan pangan Kabupaten

### *d. Ancaman (Threats)*

- 1) Pertumbuhan penduduk semakin tinggi
- 2) Adanya daerah rawan pangan
- 3) Alih fungsi lahan
- 4) Perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi pangan.
- 5) Fluktuasi harga pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
- 6) Persaingan dengan produk pangan impor.
- 7) Bencana alam yang dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur.
- 8) belum adanya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terhadap konsumen

Dari analisa SWOT yang dilakukan maka dapat dibuat matrik seperti tabel berikut ini :

Tabel Matriks SWOT identifikasi alternatif strategi meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (Strengths) / S</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dukungan kebijakan pemerintah daerah</li> <li>2) Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam bidang ketahanan pangan</li> <li>3) Infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan pangan, lahan pertanian, dan alat pertanian.</li> <li>4) Data dan informasi yang lengkap mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan di wilayah kerja.</li> <li>5) Program-program yang telah berjalan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (Weaknesses)/ W</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan operasional dan pengembangan program.</li> <li>2) Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah.</li> <li>3) Keterbatasan akses informasi dan teknologi bagi petani dan masyarakat.</li> <li>4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program ketahanan pangan.</li> <li>5) Masalah distribusi pangan yang belum optimal.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Peluang (Opportunities) / O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.</li> <li>2) Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat khususnya Badan Pangan Nasional.</li> <li>3) Perkembangan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas.</li> <li>4) Potensi pengembangan agrowisata dan pemasaran produk pangan lokal.</li> <li>5) Kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan ketahanan pangan Kabupaten</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi Kekuatan-Peluang (SO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan program-program inovatif dengan memanfaatkan peluang yang ada, misalnya pengembangan produk pangan lokal unggulan dengan memanfaatkan teknologi pertanian terkini.</li> <li>• Menambahkan jumlah lumbung pangan pendukung kemandirian pangan</li> <li>• Kerjasama dengan pihak lain guna peningkatan kegiatan dinas ketahanan pangan</li> <li>• Meningkatkan produksi pangan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi Kelemahan-Peluang (WO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan pelatihan dan pendampingan.</li> <li>• Peningkatan bantuan dan pengawasan sarana produksi pertanian.</li> <li>• Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung untuk mengembangkan program-program yang efektif dan efisien dalam meningkatkan ketahanan pangan</li> </ul>

<b>Ancaman (Threats) / T</b>	<b>Strategi Kekuatan-Ancaman (ST)</b>	<b>Strategi Kelemahan-Ancaman (WT)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertumbuhan penduduk semakin tinggi</li> <li>2) Adanya daerah rawan pangan</li> <li>3) Alih fungsi lahan</li> <li>4) Perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi pangan</li> <li>5) Fluktuasi harga pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.</li> <li>6) Persaingan dengan produk pangan impor.</li> <li>7) Bencana alam yang dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur.</li> <li>8) belum adanya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terhadap konsumen</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan mengembangkan sistem informasi dan teknologi pertanian yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan serangan hama penyakit.</li> <li>• Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan.</li> <li>• Memanfaatkan jaringan kerja sama yang luas untuk mengembangkan strategi mitigasi terhadap kenaikan harga pangan</li> <li>• Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung untuk mengembangkan program-program adaptasi terhadap keamanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi dampak bencana alam dan fluktuasi harga pangan.</li> <li>• Optimalisasi program diversifikasi pangan dan gizi serta keamanan pangan</li> <li>• Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan.</li> <li>• Menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan dan BUMN dalam rangka penanganan ketersediaan dan Cadangan pangan.</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

No	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
1	DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	<p>Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti lumbung pangan, dan rantai jemur</p> <p>Masih kurangnya jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga penguatan cadangan pangan dimasyarakat belum optimal</p> <p>Mutu gabah dan beras yang masih rendah.</p> <p>Masih sedikitnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab. Tanjabbar</p>	<p>Untuk menambah jumlah lumbung pangan diharapkan ada dukungan pemerintah untuk membangun lumbung pangan maupun rantai jemur yang memadai melalui dana APBN atau APBD</p> <p>SDM pengelola kelembagaan usaha pangan masyarakat dan TTI</p> <p>Sarana prasarana serta permodalan dari kelembagaan usaha pangan masyarakat</p> <p>Keterbatasan dana untuk pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)</p>

No	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
2	KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	<p>Adanya Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan meliputi keadaan infrastuktur transportasi desa serta tingkat kesejahteraan masyarakat</p> <p>Kurangnya sosialisasi dan Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan di Kab. Tanjung Jabung Barat</p>	<p>Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan belum maksimal seperti integrasi program antar OPD terkait didaerah rentan rawan pangan</p> <p>Peningkatan produksi pangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>SDM di tingkat kelompok masyarakat untuk mengatasi rentan rawan pangan</p>

No	Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
3	KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	<p>Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal terutama dari beras ke sumber karbohidrat lain non beras.</p> <p>Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah di beberapa tempat terutama konsumsi energi dan protein</p> <p>Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan pelaku utama/petani mendaftarkan sertifikasi produk pertanian / pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan</p>	<p>Belum terbiasanya masyarakat untuk menganekaragamkan / diversifikasi sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain</p> <p>Adanya anggapan masyarakat bahwa “<i>Belum makan nasi, masih belum makan</i>”</p> <p>Tingkat konsumsi pangan hewani cenderung berhubungan positif dengan pendapatan rumah tangga</p> <p>Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki ada untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan serta pengawasan serta Penyebaran informasi dan edukasi tentang mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</p>

## 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Metode penentuan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penguatan Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

2) Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Potensi daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.

3) Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganeekaragaman sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain.

4) Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi

dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

5) Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (a) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah**. Pada tingkat ketersediaan, tujuan ini dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan.

Dengan melihat Angka Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein, dapat diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Sedangkan penyusunan perencanaan ketersediaan pangan melalui pengelompokan PPH dilakukan berdasarkan tingkat konsumsi hasil angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Dengan demikian perencanaan ketersediaan pangan tersebut tetap mempertimbangkan kecukupan gizi dan keberagaman pangan yang seimbang.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.

### 3.2 Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ada tiga Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu (1) *Meningkatnya cadangan pangan pemerintah dengan indikator Cadangan pangan pemerintah kabupaten* (2) *Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan* dan (3) *Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar, yang ditunjukkan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat.*

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu (1) *Meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan* dan (2) *Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah, yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan.*

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 s/d 2030 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**TABEL 3.1**  
**PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Ketahanan daerah	81,00	81,70	82,80	82,80	83,70	84,50	
Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Ketahanan Pangan	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	
	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	67,10	70,00	72,00	73,50	75,00	75,80	
	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	94,00	94,60	95,00	95,80	96,00	96,20	

Adapun penahapan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Renstra Tahap 1 diarahkan untuk penguatan pondasi untuk mewujudkan ketersediaan cadangan pangan dan terjangkau	Renstra tahap 2 merupakan Akselerasi percepatan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Renstra tahap 3 merupakan lanjutan Akselerasi percepatan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Renstra tahap 4 merupakan lanjutan Akselerasi percepatan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

### 3.3 Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1) Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2) Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3) Penanganan kerawanan pangan dan 4) Keamanan pangan. Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 adalah :

1. *Pemanfaatan sistem pelaporan kinerja digital terpadu (E-Kinerja) yang dapat diakses secara real-time oleh pimpinan.*

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan proses, mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu, serta meningkatkan efisiensi

dan efektivitas dalam pelayanan publik. Sedangkan pengawasan internal yang efektif dengan melakukan Evaluasi kinerja secara berkala memuntuk bantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan.

2. *Penguatan Cadangan Pangan serta Mengembangkan kemitraan dengan daerah lumbung/ penghasil (champion), Kelompok Tani dan Gapoktan dalam rangka membangun Insfrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung Barat*

Kemandirian pangan adalah sebuah tujuan yang membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur pangan dan penguatan cadangan pangan adalah bagian dari upaya tersebut, dan kemitraan dengan daerah lumbung dan kelompok tani merupakan kunci keberhasilan

3. *Pengembangan Pengolahan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)*

Strategi pengembangan pengolahan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui edukasi, pelatihan, dan pengembangan pangan lokal. Tujuannya adalah mendorong pola konsumsi yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan serta Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi B2SA

4. *Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan*

Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sangat penting untuk menjamin kesehatan masyarakat. PSAT berpotensi mengandung cemaran kimia, biologis, atau benda asing yang dapat membahayakan, seperti residu pestisida, mikotoksin, atau logam berat. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel, sosialisasi, monitoring, serta pembinaan pelaku usaha.

5. *Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan serta Peningkatan stabilitas pasokan, harga pangan*

Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan peningkatan stabilitas pasokan serta harga pangan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penguatan cadangan pangan, diversifikasi pangan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui korporasi usaha tani. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun ketahanan pangan yang lebih kuat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

#### **3.4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029**

Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2025 – 2029). Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Bupati 2025 – 2029 yang dilaksanakan melalui satu misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun rumusan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang adalah :

1. Menerapkan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan.
2. Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan serta pengadaan cadangan pangan kabupaten
3. Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
4. Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

5. Optimalisasi intervensi kerawanan pangan dan gizi Berdasarkan Peta FSVA serta kegiatan gerakan pangan murah.

Adapun penyelerasan arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Urusan Tata kelola Pemerintahan	Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pemanfaatan sistem pelaporan kinerja digital terpadu (E-Kinerja) yang dapat diakses secara real-time oleh pimpinan	
2	Urusan Pangan	Peningkatan infrastruktur logistik dan rantai pasok	<p>Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan serta pengadaan cadangan pangan kabupaten</p> <p>Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)</p> <p>Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</p> <p>Optimalisasi intervensi kerawanan pangan dan gizi Berdasarkan Peta FSVA serta kegiatan gerakan pangan murah</p>	

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

Program Dinas Ketahanan Pangan umumnya fokus pada menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan informasi harga pangan, pemantauan stok dan pasokan, hingga pengembangan kelembagaan usaha pangan dan diversifikasi konsumsi. Program Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya (Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) yaitu :

#### **a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dapat mencakup aspek Pengembangan Infrastruktur yaitu Revitalisasi infrastruktur pangan seperti gudang beras, lantai jemur, dan rumah RMU beserta mesin RMU dan sarana pendukungnya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi pangan. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil serta Meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.

Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kemandirian pangan nasional, sehingga Asta Cita Swasembada Pangan dapat tercapai. Adapun outcome dari program ini adalah meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indikator persentase jumlah cadangan pangan.

Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

#### **b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Tujuan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dalam mendukung Asta Cita yaitu melaksanakan diversifikasi pangan masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi bagi masyarakat
- Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, ekonomi, dan sosial
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan bergizi

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Pengendalian Inflasi Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Outcome dari program ini adalah meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan.

Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- 4) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 5) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- 6) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

### **c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Tujuan Program Penanganan Kerawanan Pangan dalam mendukung asta cita yaitu Mengurangi kerawanan pangan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, perubahan iklim, dan bencana serta Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang rentan. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Mengurangi kerawanan pangan masyarakat yang rentan
- Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang rentan
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan melalui akses pangan yang cukup dan bergizi

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini di Dinas Ketahanan Pangan adalah Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan melalui kegiatan Genius (Gerakan Edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa) dengan Sosialisasi, Pemberian makanan tambahan, Lomba-lomba.

Outcome dari program ini adalah meningkatnya penanganan kerawanan pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan. Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

### **d. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Tujuan Program Pengawasan Keamanan Pangan dalam mendukung asta cita yaitu Meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat dan Mengurangi risiko keracunan pangan dan penyakit yang terkait dengan pangan. Adapun beberapa manfaat dari program ini adalah :

- Meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat
- Mengurangi risiko keracunan pangan dan penyakit yang terkait dengan pangan
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan

Salah satu Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh program ini di Dinas Ketahanan Pangan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Pengawasan dan Keamanan Pangan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan indikator persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan. Adapun Kegiatan yang sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri adalah :

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025 s/d 2030 serta besaran pagu pendanaan indikator dapat dilihat pada matrik Program dan Kegiatan dari tahun 2025 s/d 2030 pada Tabel 4.3 berikut ini

**TABEL 4.3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025 - 2030**

KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	67,52	69,00	4.238.950.538	70,00	7.876.805.340	71,00	12.708.000.000	72,00	10.119.000.000	73,00	9.859.366.000	74,00	9.859.366.000	
Nilai IKM		80,04	81,70		81,70		82,80		82,80		83,70		84,50			
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan		70%	70%		70%		70%		70%		70%		70%			
01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP</i>	4	5	100.000.000	4	200.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	3	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun</i>	1	1	2.889.609.164	1,00	4.550.000.000	1,00	5.150.000.000	1,00	5.200.000.000	1	5.700.000.000	1	5.700.000.000	
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	18	18	2.689.609.164	25	4.000.000.000	35	4.500.000.000	35	4.500.000.000	35	5.000.000.000	35	5.000.000.000	
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	-	-	-	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	
01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan (laporan)</i>	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan</i>	100%	100%	140.000.000	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	



KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	19.800.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	300.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>540.366.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>740.366.000</b>	<b>100%</b>	<b>740.366.000</b>	
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	300.000.000	15	300.000.000	15	500.000.000	16	500.000.000	17	500.000.000	17	500.000.000	
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	30	40.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	-	1	40.366.000	1	3.000.000.000			1	40.366.000	1	40.366.000	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>Persentase Jumlah Cadangan Pangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.450.000.000</b>									
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (unit)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>6</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>4</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>4</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>4</b>	<b>5.450.000.000</b>	<b>4</b>	<b>5.450.000.000</b>	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)		0	-	6	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	-	3	100.000.000	6	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>93,20</b>	<b>94,00</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>94,60</b>	<b>2.470.000.000</b>	<b>95,00</b>	<b>3.385.000.000</b>	<b>95,80</b>	<b>3.695.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>3.805.000.000</b>	<b>96,00</b>	<b>3.805.000.000</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga</b>	<b>Jumlah Pangan Pokok (Beras) yang Disalurkan sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten (ton)</b>	<b>255</b>	<b>300</b>	<b>382.000.000</b>	<b>335</b>	<b>925.000.000</b>	<b>350</b>	<b>1.415.000.000</b>	<b>400</b>	<b>1.465.000.000</b>	<b>450</b>	<b>1.565.000.000</b>	<b>470</b>	<b>1.565.000.000</b>	

KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)				1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	6	6	50.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	-	-	50	300.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan ( Dokumen )	-	-	-	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	20	20	120.000.000	20	150.000.000	20	225.000.000	20	250.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	62.000.000	1	80.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten</b>	<b>41,42</b>	<b>6,6</b>	<b>295.000.000</b>	<b>10</b>	<b>665.000.000</b>	<b>10</b>	<b>970.000.000</b>	<b>10</b>	<b>1.230.000.000</b>	<b>10</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>10</b>	<b>1.240.000.000</b>	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	41,422	6,60	200.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	-	-	-	3	80.000.000	5	100.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang	-	10	60.000.000	10	60.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	
2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	-	-	-	3	60.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) / Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)</b>				<b>2100 / 57</b>	<b>373.000.000</b>	<b>2100 / 57</b>	<b>880.000.000</b>	<b>2100 / 57</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2100 / 57</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2100 / 57</b>	<b>1.000.000.000</b>	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	23.000.000	1	80.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	2	2	350.000.000	4	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	

KODE	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</b>	<b>34%</b>	<b>32%</b>	<b>410.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>28%</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>25%</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>23%</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>22%</b>	<b>1.700.000.000</b>	
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>	<b>Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>133.000.000</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	133.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Prioritas 1,2,3 Peta GSYA</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>277.000.000</b>	<b>40</b>	<b>850.000.000</b>	<b>37</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>33</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>30</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>29</b>	<b>1.300.000.000</b>	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota ( Laporan )	2	2	277.000.000	2	350.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( Dokumen )	-	-	-	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	-	-	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	<b>92.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>480.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>1.200.000.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>92.000.000</b>	<b>7</b>	<b>480.000.000</b>	<b>7</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>9</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>9</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>10</b>	<b>1.200.000.000</b>	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3	90.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-	-	-	3	90.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	62.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2	8	30.000.000	9	40.000.000	10	250.000.000	11	300.000.000	13	350.000.000	13	350.000.000	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	-	-	-	1	120.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
<b>TOTAL</b>					<b>5.890.950.538</b>		<b>17.376.805.340</b>		<b>24.243.000.000</b>		<b>22.064.000.000</b>		<b>22.014.366.000</b>		<b>22.014.366.000</b>	

#### **4.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029**

Indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029. Indikator kinerja tersebut tersaji pada tabel – tabel berikut

**Tabel 4.2**  
**Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan TA 2025-2029**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas	<i>1) Meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas Perangkat</i>			Nilai SAKIP dan Nilai IKM		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkat		<i>2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah</i>	<b>Meningkatnya Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</b>	<p><b>Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b></p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Tersusunnya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p><b>Terlaksananya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan</b></p> <p>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</p>	<p><i>Nilai SAKIP</i></p> <p><i>Nilai IKM</i></p> <p><b>Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</b></p> <p><b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP</b></p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</p> <p>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BA)</p> <p><b>Jumlah laporan administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan (laporan)</b></p> <p>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)</p>	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p><b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p><b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	
				<b>Terlaksananya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan (laporan)</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terlaksananya cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<b>Tersedianya jasa penunjang kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan (%)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				<p>Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</p> <p>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi</p>	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	2) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	3) <i>Meningkatnya cadangan pangan pemerintah</i>	<p><b>Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</b></p> <p><b>Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b></p>	<p><b>Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan</b></p> <p>Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan</p> <p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</p> <p>Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Indeks Ketahanan Pangan</p> <p><i>Persentase Cadangan pangan pemerintah kabupaten</i></p> <p><b>Persentase Jumlah Cadangan Pangan</b></p> <p><b>Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan (unit)</b></p> <p>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)</p> <p>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)</p> <p>Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (Laporan)</p> <p><b>Skor Pola Pangan Harapan</b></p> <p><b>Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten</b></p>	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b></p> <p><b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik</p> <p>Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b></p>	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				<p>Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</p> <p>Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)</p>	<p>Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)</p> <p>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)</p> <p>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota(Ton)</p> <p>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)</p> <p>Jumlah LPM yang terfasilitasi</p>	<p>Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</p> <p>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)</p>	
		<p>4) Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan segar</p>	<p><b>Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b></p>	<p>Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p>	<p><i>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat</i></p> <p><b>Skor Pola Pangan Harapan</b></p> <p><b>Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) / Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)</b></p>	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b></p>	
			<p><b>Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan</b></p>	<p>Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</p> <p>Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Terlaksananya Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p>	<p>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)</p> <p>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)</p> <p>Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p><b>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan</b></p>	<p>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p><b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b></p>	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				<p>Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</p> <p>Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</p> <p>Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p> <p>Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p>	<p>Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar</p> <p>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</p> <p>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)</p> <p>Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)</p> <p>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)</p>	<p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</p> <p>Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p> <p>Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p>	
		<p>5) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penanganan kerawanan pangan</p>	<p>Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<p>Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga</p> <p>Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</p>	<p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan</p> <p>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)</p> <p>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)</p>	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b></p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</p>	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				<p>Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</p> <p>Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</p> <p>Tersedianya Informasi Stok Pangan</p> <p>Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota</p> <p>Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis</p> <p>Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)</p> <p><b>Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b></p> <p>Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p><b>Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</p> <p>Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</p> <p>Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)</p> <p>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Laporan)</p> <p>Informasi Stok Pangan ( Dokumen )</p> <p>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)</p> <p>Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (dokumen)</p> <p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)</p> <p>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)</p> <p><b>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</b></p> <p><b>Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan</b></p> <p>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)</p> <p><b>Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Prioritas 1,2,3 Peta FSVA</b></p> <p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota ( Laporan )</p> <p>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( Dokumen )</p> <p>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p>	<p>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</p> <p>Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</p> <p>Pemantauan Stok Pangan</p> <p>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</p> <p>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)</p> <p><b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b></p> <p><b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b></p> <p>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</p> <p><b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</p> <p>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</p>	

**Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (Beras)  Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan, Lantai Jemur, Rumah RMU dan Mesin RMU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota  Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Program Genius (gerakan Edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa) (Sosialisasi, Pemberian makanan  Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi hasil Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten (FSVA)
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)  Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Pengawasan dan Pengujian Kualitas Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)



**TABEL 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030**

No	Indikator Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>								
1	Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Penguatan Cadangan Pangan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase	31,34%	29,85%	27,61%	24,63%	22,39%	20,00%	
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase	60%	60%	65%	65%	70%	70%	
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat		94,00	94,60	95,00	95,80	96,00	96,10	
6	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita								
	a. Ketersediaan Energi	kcal/kap/hari	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	b. Ketersediaan Protein	gram/kap/hari	63	65	70	75	75	75	

## BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri, dan Berinovasi).

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir periode.

Renstra Tahun 2025-2029 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Kuala Tungkal, Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. YANERY, S.Pt, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700930 199703 1 003